



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENEMBAKAN WNI DI MALAYSIA

Lisbet

Analisis Legislatif Ahli Madya
lisbet.sihombing@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada tanggal 24 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 waktu setempat di perairan Tanjung Rhu, negara bagian Selangor, Malaysia, telah terjadi penembakan terhadap 5 Warga Negara Indonesia (WNI). WNI yang menjadi korban penembakan membantah hendak melawan dengan menggunakan senjata tajam kepada petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Namun, keterangan mereka berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal APMM, Laksamana Datuk Mohd Rosli Abdullah, yang mengatakan bahwa kasus penembakan terjadi sebagai bentuk tindakan pertahanan diri. Menurut Abdullah, WNI yang berada di kapal tersebut hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal. Mereka berupaya lolos dari penangkapan dengan cara menabrak kapal patroli maritim APMM sampai beberapa kali dan berupaya menyerang dengan parang panjang. Sebagai pertahanan diri, tembakan peringatan dilepaskan ke arah kapal tersebut. Akan tetapi, kapal tersebut tancap gas dan lolos dalam kegelapan. Kapal yang lolos tersebut akhirnya kandas di kawasan hutan bakau di daerah Banting, yang masih berada di Kawasan Selangor, Malaysia.

Presiden RI, Prabowo Subianto, dan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, telah membahas kasus penembakan 5 WNI tersebut. Presiden Prabowo meyakini bahwa Pemerintah Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Presiden Prabowo juga mengingatkan seluruh WNI untuk tidak melakukan tindakan ilegal untuk masuk ke negara asing.

Kasus ini telah ditangani oleh Markas Besar Kepolisian Negara Bagian Selangor Darul Ehsan, setingkat dengan kepolisian daerah di Indonesia. Selain itu, Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, juga menyampaikan bahwa sesuai dengan permintaan Pemerintah Indonesia, Polis Diraja Malaysia telah memeriksa aparat APMM yang diduga melepaskan tembakan. Aparat APMM tersebut statusnya non-aktif untuk memudahkan penyelidikan oleh polisi.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mendorong adanya penyelidikan menyeluruh atas kasus penembakan yang menewaskan satu WNI oleh APMM Malaysia, termasuk adanya potensi penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive use of force*). Selain itu, Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha Nugraha, memastikan Kemlu dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur akan memberikan pendampingan hukum kepada WNI korban penembakan dan membiayai perawatan mereka di rumah sakit hingga sembuh. Judha juga menyampaikan bahwa KBRI Kuala Lumpur juga meminta pengacara KBRI untuk mengkaji dan menyiapkan langkah hukum terkait kasus penembakan tersebut. Untuk itu, KBRI Kuala Lumpur terus mengumpulkan informasi lebih lengkap untuk mendapatkan konstruksi kejadian yang lebih jelas.

KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses kekonsuleran untuk menemui empat WNI yang dirawat di Rumah Sakit Serdang dan Rumah Sakit Klang, di negara bagian Selangor, Malaysia, pada tanggal 28 Januari 2025. Di saat yang sama, KBRI Kuala Lumpur juga telah mengurus proses kepulangan 1 WNI yang meninggal.

Terkait kasus penembakan ini, pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menyebutkan bahwa pengakuan dari korban penembakan sebaiknya dibuat secara berkekuatan hukum dan diatas sumpah agar semakin sah. Pengakuan dan referensi lain hendaknya menjadi kertas posisi Pemerintah RI saat Pemerintah Malaysia menindaklanjuti nota diplomatik dari KBRI.

Atensi DPR

Kasus penembakan 5 WNI oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) juga telah mendapatkan atensi dari Komisi I DPR RI. Komisi I DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan dapat mendukung upaya Kemlu untuk melakukan komunikasi dengan Pemerintah Malaysia agar memastikan penyelidikan dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Selain itu, Komisi I DPR RI juga perlu mendorong Kemlu untuk mengajak semua lembaga yang terkait seperti Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan *non-governmental organization* (NGO) Migrant Care untuk berkoordinasi dan bekerja sama sehingga pemerintah Indonesia dapat mengambil tindakan tegas dan cepat dalam menangani kasus penembakan WNI ini. Meskipun demikian, Komisi I DPR RI juga perlu meminta Kemlu untuk melakukan langkah diplomatik agar hubungan baik kedua negara dapat terus terjaga namun tetap memastikan pelindungan terhadap WNI di luar negeri.

Sumber

Kompas, 28, 30, dan 31 Januari 2025;
Media Indonesia, 30 dan 31 Januari 2025.

Minggu ke-5 Januari
(27 Januari s.d. 2 Februari 2025)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making